

PENERAPAN ASPEK YIN-YANG UNTUK PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERENCANAAN KOTA (STUDI KASUS DI KELURAHAN BELIAN KOTA BATAM)

Dian Hari Susanto¹, Yuanita FD Sidabutar², OK Henry³

Fakultas Teknik, Universitas Batam
Program Studi Magister Perencanaan Wilayah
Email: .102624001@univbatam.ac.id, yuanita.fd@univbatam.ac.id, doktor.henry@gmail.com

uploaded: 18/06/2025 revised: 18/06/2025 accepted: 18/06/2025 published: 01/09/2025

Abstrak

Sebagai bagian dari budaya timur, filosofi Yin dan Yang sangat kental di masyarakat. Artikel ini dimaksudkan untuk mempelajari dan menemukan keseimbangan antara unsur positif dan negatif pedagang kaki lima (PKL) dalam perencanaan kota melalui harmonisasi kebijakan. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan memperhatikan teori-teori yang ada secara sederhana dan menggunakan analisis TOWS dalam menarik kesimpulan. Hasil kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa perlu dilakukan pendalaman setiap aspek positif dan negatif secara seimbang dan komprehensif agar mendapatkan dampak harmonisasi yang saling menguntungkan bagi kebijakan pemerintah, masyarakat dan PKL

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Harmonisasi, Analisis TOWS

I. PENDAHULUAN

Dalam permasalahan perkotaan, saat ini PKL cenderung menjadi objek yang muncul di setiap area distribusi perumahan, apalagi pemerintah diberi pilihan yang sulit antara menyediakan kawasan aglomerasi untuk kenikmatan konsumsi yang murah dan terjangkau, dan juga menyediakan pertumbuhan ekonomi mikro. Dalam perencanaan kota, PKL juga menjadi salah satu topik penting yang harus digali secara komprehensif.

Di wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kecamatan Batam Kota, Kelurahan Belian, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menata kota yang baik sekaligus membangun perekonomian masyarakat.

Munculnya PKL yang ada tidak terlepas dari kebutuhan dasar manusia itu sendiri, dengan adanya permintaan dan penawaran, oleh karena itu diperlukan pendekatan dasar perspektif individualistik manusia dalam menyulap permasalahan menjadi harmonis.

Salah satu pola manajemen sederhana dalam pendekatan oriental adalah pendekatan manajemen yin-yang, di mana melalui manajemen perspektif yin-yang dalam perencanaan kota dapat menghubungkan keseimbangan dengan solusi pemenang bagi semua pihak secara seimbang. "Yin dan Yang adalah konsep dari filosofi tradisional Tiongkok yang mewakili saling melengkapi dalam kebalikan. Ini melambangkan gagasan bahwa keragaman tidak hanya hadir tetapi perlu".

Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota dalam lingkup Pemerintahan Kota Batam memiliki batas administratif sebagai berikut :

1. Utara : Kelurahan Sambau
2. Selatan: Kelurahan Muka Kuning
3. Barat: Kelurahan Baloi Permai
4. East: Kelurahan Batu Besar



Gambar 1 Batas Wilayah Kelurahan Belian

II. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk masalah di atas, tujuan artikel ini adalah :

1. Apa saja permasalahan PKL saat ini di Kelurahan Belian, Kota Batam?
2. Bagaimana Cara Menganalisis Solusi dalam Masalah PKL?
3. Apa pendekatan sederhana yin-yang dalam memecahkan manajemen perkotaan?

Menurut UN Habitat Perencanaan Kota adalah perencanaan tata ruang kota yang mencakup semua aspek kehidupan dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam perencanaan kota adalah untuk membuat gambaran tentang pola lingkungan fisik yang ada dan hubungan antara ruang perkotaan dan fungsi yang saling terkait. Perencanaan kota dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dalam perencanaan dan pengelolaan kota, interkorelasi dan interaksi manusia dengan lingkungan daerah juga menjadi perhatian, Hal ini juga sejalan dengan aspek konseptual yin yang, di mana harmonisasi lingkungan dan manusia menjadi fokus unit utama.

Kota berkembang mengikuti jumlah dan aktivitas manusia. Bentuk pertumbuhan masing-masing kota berbeda. Ada tiga konsep

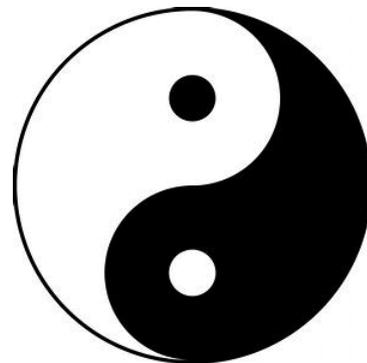
klasik yang digunakan untuk menggambarkan pola spasial kota.

1. Ketiga teori tersebut adalah:
2. Teori zona konsentris
3. Teori sektoral
4. Teori inti ganda

Teori konsentris Menurut Ernest W Burgess dalam Pengantar Ilmu Sosiologi (1921), manusia memiliki kecenderungan alami untuk berada sedekat mungkin dengan pusat kota. Untuk mewujudkan hal tersebut, dikembangkan kota konsentris dengan pusat kota sebagai intinya. Teorinya didasarkan pada pengamatannya terhadap kota Chicago pada tahun 1923. Berdasarkan teori Burgess, kota ini dibagi menjadi lima zona, yaitu: Zona aktivitas pusat atau CBD (kawasan pusat bisnis) Ada toko-toko besar, gedung perkantoran, bank, restoran, pusat bisnis, dan sebagainya Zona transisi Area ini terikat dengan zona pusat area kegiatan.

Dalam teori sektoral, zona di kota dibagi seperti pita. Orang cenderung membangun aktivitas sedekat mungkin dengan jalan utama. Dengan meningkatnya sistem jaringan jalan dan lalu lintas, aktivitas juga akan meningkat. Pembagian lahan berdasarkan pembagian sektor sesuai dengan perkembangan wilayah baru. Teori inti ganda/ganda diprakarsai oleh CD Harris dan F. L. Ullman dan diterbitkan dalam jurnal berjudul The Nature of Cities (1945). Menurut mereka, sebuah kota tidak hanya memiliki satu CBD, tetapi beberapa CBD.

Dari teori perkotaan, kawasan PKL dapat diasosiasikan melalui teori di atas sebagai acuan solusi akar masalah.



Gambar 2 Simbolik visualisasi Yin dan Yang

Yin-yang adalah filosofi dan gaya hidup Tiongkok yang merangkul paradoks, dinamika, dan perubahan. Ini melibatkan tiga prinsip: dialektis, holistik, dan dinamis. Dalam filsafat Tiongkok, penyatuan yin dan yang adalah keadaan keseimbangan. Model yin-yang menangkap gagasan bahwa tidak ada kebalikan—tidak ada batas mutlak antara hitam (yin) dan putih (yang); Titik Yin ada di Yang, dan titik Yang juga ada di Yin. Menampilkan interaksi dinamis antara dua sisi yang berlawanan, model yin-yang (gambar 2) merangkul koeksistensi elemen yang berlawanan dalam lingkungan yang sama. Yin dan yang membentuk keseimbangan dialektis yang mencerminkan inti keberadaan alami dan organik, di mana kekuatan saling melengkapi. Dalam model yin-yang, yin mewakili kekuatan feminin, seperti bulan, air, kegelapan, kapasitan, intuisi, kelembutan, kontraksi, dan menyerah di alam semesta, sedangkan yang mewakili kekuatan maskulin, seperti matahari, api, cahaya, aktivitas, pemikiran rasional, keras, ekspansi, dan ketegangan. Jadi, meskipun garis S membagi lingkaran menjadi dua sisi, area gelap dan putih saling bergantung dan saling penetratif. Mata kecil di area putih dan gelap menunjukkan sifat terjalin dan dinamis dari gaya yin dan yang, masing-masing.

Dampak dari ketidakharmonisan yin dan yang dalam kearifan lokal dapat menyebabkan ketidakseimbangan bahkan bencana di alam semesta, baik sifat yang ada pada manusia secara filosofis maupun geografis, banjir, angin topan, kebakaran, dan lain-lain merupakan cerita yang tidak terlepas dari kebijaksanaan yang diajarkan oleh konsep yin dan yang.

Hal ini merupakan pendekatan yang menjadi pilihan untuk permasalahan perkotaan dimana keberadaan PKL sendiri dapat menjadi berkah tersembunyi atau bencana yang merugikan pembangunan perkotaan.

5. Melalui prinsip yin dan yang baik harmonis dari nilai positif dan negatif dari masalah PKL akan digambarkan dan dibandingkan dengan solusi untuk menemukan penyelesaian keseimbangan terbaik.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Pedagang kaki lima dengan segala

masalahnya sebenarnya dapat diberikan solusi yang baik, tetapi birokrasi yang berbelit-belit dan konsep dan teori yang berbelit-belit menyebabkan pendekatan humanis sederhana terpinggirkan dan dilupakan. Terkadang masalah manusia dapat diselesaikan dengan bijak dan dengan solusi yang jelas, asalkan dilakukan dengan pendekatan humanis dan juga harmonis, sehingga implementasi di lapangan tidak rumit dan sulit untuk diimplementasikan. Itulah konsep kearifan lokal dan budaya timur oriental yang diwariskan secara unik oleh bangsa Indonesia. Meskipun masalah yang rumit dapat diselesaikan hanya dengan solusi yang disederhanakan. Pada artikel ini akan menyoroiti permasalahan PKL dengan aspek yin yang melalui perbandingan instrumen TOWS untuk memberikan analisis.

Dalam kondisi yang ada di lapangan, Pemerintah Daerah telah membuat prosedur terkait pengaturan Kawasan Milik Jalan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang ketertiban umum⁶. Pedagang Kaki Lima juga diatur oleh pemerintah kota melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam ⁷.



Gambar 3 Beberapa pelanggaran dapat terlihat dikawasan teras ruko yang dimanfaatkan untuk PKL di Kelurahan Belian.

Pemerintah Kota Batam menerapkan kebijakan yang mirip dengan perjanjian tidak tertulis untuk pedagang kaki lima di Kota Batam, salah satunya adalah kesepakatan untuk memulai jam operasional untuk melakukan usaha, pungutan dan penerimaan bukan pajak atas penerimaan pemerintah untuk kebersihan dan juga izin yang tidak berlaku untuk pedagang tidak tetap.

Hal ini merupakan salah satu bentuk kesepakatan yang telah terjadi, khususnya di

wilayah Kelurahan Belian.



Gambar 4 PKL yang memanfaatkan bahu jalan di Kelurahan Belian, Batam

Pemerintah belum melakukan perbaikan dan solusi yang komprehensif terkait penataan PKL di Kota Batam meskipun pemerintah memiliki instrumen penegakan kebijakan daerah.

Salah satu keterbatasan pemerintah daerah adalah hak dan kewenangan untuk mengelola tanah atau kawasan di Kota Batam karena kewenangan yang sepenuhnya dikendalikan oleh Badan Usaha (BP) Batam, membuat alokasi lahan oleh pemerintah daerah sangat sulit untuk melakukannya.



Gambar 5: PKL yang menggunakan jalur pedestrian di Belian, Batam

PKL di Kelurahan Belian memiliki potensi positif dalam membangun kota, karena aspek ekonomi mikro yang jelas terpengaruh dan simbiosis kebutuhan permintaan dan penawaran membuat seleksi alami pedagang terjadi, produk PKL yang bertahan tentu akan bertransformasi dan berkembang dalam bentuk bisnisnya secara ekonomi, sebagai pertimbangan lain dari tingginya potensi

kunjungan wisatawan mancanegara, Kota Batam sebagai tempat kota ke-3 yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara di Indonesia.



Gambar 6 PKL yang berada di daerah titik tujuan wisata, di Belian, Batam

IV. HASIL PENELITIAN

Dari rumusan di atas, kita dapat membandingkan rumus analisis sebagai berikut:

Analisis (TOWS Komparasi Deskriptif): Threats

Posisi ancaman terhadap keberadaan PKL dari perspektif positif dan negatif dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1. Thrats

Yang (+)	Yin (-)	Harmonisasi
1. Ledakan kunjungan ke PKL	1. Penurunan Kesehatan Masyarakat	1. Menumbuhkan standar kesehatan dan kebersihan lingkungan bagi pedagang
2. PKL nyaman dengan kondisi bisnis mereka	2. Kemacetan lalu lintas	2. Penataan area khusus untuk PKL di suatu daerah
3. Faktor penjualan membuat orang enggan pindah	3. Gangguan ketertiban umum dan sosial	3. Penciptaan standarisasi PKL dan pemberian izin khusus untuk pelaksanaannya
4. Penyebaran pedagang kaki lima	4. Masalah limbah kebersihan	
	5. Mengganggu bisnis pemilik ruko permanen	

Opportunity

Peluang terhadap keberadaan PKL dari perspektif positif dan negatif dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2. Opportunity

Yang (+)	Yin (-)	Harmonisasi
1. Potensi devisa melalui kunjungan wisatawan	1. Menyediakan produk dan peluang bisnis di kantor pusat dan area kegiatan	1. Persiapan infrastruktur zonasi kantor dan bisnis untuk PKL
2. Potensi pengembangan dan peningkatan transformasi ekonomi mikro	2. Peluang urbanisasi dari pinggiran kota	2. Pemerataan pedagang dengan memetakan permukiman, perkantoran, usaha dan distribusi penduduk
3. Penyediaan produk yang murah dan terjangkau	3. Peluang membuka sumber baru pusat kegiatan dan bisnis	3. Pembuatan database PKL

Weakness

Poin kelemahan keberadaan PKL dari perspektif positif dan negatif dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3. Weakness

Yang (+)	Yin (-)	Harmonisasi
1. Persaingan dan seleksi alam untuk PKL	1. Kewenangan pertanahan terbatas oleh pemerintah daerah	1. Kerja sama antar pemangku kepentingan dalam menciptakan kolaborasi dan keterlibatan strategis regional
2. Persaingan dan seleksi alam untuk PKL memunculkan kualitas Peraturan tentang penataan PKL kota sudah ada	2. Peraturan belum mengakomodasi kepentingan PKL	2. Membuat peraturan baru terkait penataan trotoar/pedestrian/ buffer zone

Strength

Poin kekuatan keberadaan PKL dari perspektif positif dan negatif dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4. Strength

Yang (+)	Yin (-)	Harmonisasi
1. Kota Batam memiliki zonasi kawasan yang telah ada sebelumnya	1. Pola perencanaan pengembangan kawasan kunjungan wisatawan sudah ada namun belum sinergis	Persiapan komprehensif dalam master plan pariwisata dan penataan mikro untuk area PKL
2. Pengaturan dimungkinkan dengan alokasi fasilitas sosial dan fasilitas umum	2. Daya tarik urbanisasi kota Batam sangat tinggi	
3. Pembuat kebijakan yang sama dengan walikota ex-officio dan kepala BP Batam		

V. KESIMPULAN

Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa pentingnya aspek sinergi bisnis PKL seiring

dengan regulasi dan lingkungan sekitar, keberadaan PKL dapat menjadi energi yang baik untuk pembangunan ekonomi jika disatukan pada tingkat konseptual yang detail. PKL dapat hidup berdampingan dalam perencanaan dan pertumbuhan kota itu sendiri tetapi perlu diatur dalam pola penataan yang baik oleh berbagai pemangku kepentingan. Setelah pemerintah dapat membuat kategorisasi, standarisasi dan pengaturan daerah pada tingkat mikro, kebijakan dan aglomerasi perizinan juga perlu diambil untuk memastikan bahwa bisnis dapat berjalan di suatu daerah.

SARAN

Sebagai saran, kami berharap akan ada penelitian lebih lanjut terkait hal ini ke depannya. Kajian mendalam diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi pemerintah dan khazanah ilmiah akademik.

DAFTAR PUSTAKA

Anita S, Rahel Situmorang, Ruang dan Pengaturan Penggunaan Lahan, Universitas Terbuka, (2022)
 Anonym Taoist (ND)
 Article [PMCID: PMC8520120 PMID: 34675700](#) , School of Business Administration, South China University of Technology, Guangzhou, China and Guangxi University, Nanning, People’s Republic of China
 Iwan Kurniawan, Perencanaan Wilayah, edisi 1, Universitas Terbuka, (2022)
 UN Habitat (2015)
 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum
 Perda Kota Batam Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial.